

DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Amanda Pinto & Martin Evans, 2003, Corporate Criminal Liability, London
Sweet & Maxwell.

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana,
2006.

David Weisburd, Elin Waring And Ellen F.Chayet, 2004, White – Collar Crime
and Criminal Careers, Cambridge University Press.

Disemadi, Hari Sutra, 2019, Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek
Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.3, No.2, Semarang.

Eddy O.S. Hiariej, “Pidana Korupsi Korporasi”. KOMPAS, 1 November 2018.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta.

Ghalia Indonesia, Jakarta.

H, Dicky Jhon, 2020, Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di
Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4 No.4.

H. Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang.

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta,

Rajawali Pers, 2015.

Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

I.Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2018, *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

John E. Ferguson Jr, 2010, *White – Collar Crime*, Chelsea House Publisher.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, 2014, *Kebijakan Integral (Integral Policy)*, *Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 Historical Essays and Studies, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence (London: Macmillan, 1907).

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet.I, (Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009)

Mardjono Reksodipoetro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia (Penyempurnaan dari Makalah tahun 1993)*, *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa ini*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014.

Martin RH dan Lewis.Y, 1974, *Criminologi: Crime and criminality*. Chicago

Rand Macnally College Publishing Company,

Mordjono Resodipuro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Prasetyo, 2008, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama,

Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.

Ronny, Saputra, 2015, *Jurnal Cita Hukum*. Vol 3 No. 2 Desember, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sahuri Lasmadi, 2003, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Sally S. Simpson, 2002, Corporate Crime, Law and Social Control, Cambridge University Press.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Kelima, Cet. IV, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

